

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Sejarah Instansi

Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, roda pemerintahan langsung tergeser dari tempatnya, termasuk pemindahan kekuasaan yang diusahakan secepatnya. Dengan demikian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera membentuk kabinet pertama, kabinet presidensial, dan mengumumkan hasilnya pada 19 Agustus 1945. Ada 15 kementerian dan 5 kementerian dalam kabinet ini, tetapi Menteri Keuangan memiliki A.A.Maramis. Salah satu posisi Sekretaris Negara dihapuskan setelah diangkat oleh Menteri Keuangan.

Kabinet Pertama belum memiliki Menteri Pertahanan, dan fungsi Kementerian Pertahanan berada di bawah yurisdiksi Menteri Keamanan Nasional, yaitu mantan Sodancho Suprijadi. Suprijadi diketahui tidak pernah menjabat Menteri Pertahanan, setelah itu pada 20 Oktober 1945 posisi Menteri Pertahanan digantikan oleh Sulyadikusumo sebagai Menteri Sementara.

Selama kabinet pertama Sjahrir dari 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946, fungsi pertahanan nasional berada di bawah yurisdiksi Menteri Keamanan Nasional, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Namun, selama periode 12 Maret hingga 2 Oktober 1946, di kabinet sekunder Sjahrir, Kementerian Pertahanan dibentuk, dipimpin oleh bapak Amir Syarifuddin. Perhatian khusus telah diberikan pada fitur perlindungan dan keamanan di dalam kabinet ini.

Selama perjalanan tersebut, jabatan Menteri Pertahanan sering dijabat oleh satu orang, seperti Perdana Menteri Amir Syarifuddin (3 Juli - 11 November 1947) dari Kabinet, yang mencerminkan betapa pentingnya fungsi pertahanan negara dalam menyelesaikan berbagai konflik menunjukkan

apa yang terjadi kemudian, Kabinet Hatta Periode I, 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam keadaan darurat di bawah tekanan tentara Belanda, Wakil

Presiden Drs. M. Hatta juga menjadi menteri pertahanan sementara. Namun, pada 15 Juli 1949, Sri Sultan Hamengku buwono IX menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sri Sultan menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Hatta ke-2 dan Kabinet Indonesia hingga 6 September 1950, dan menjabat di berbagai kabinet hingga pensiun pada 2 Juni 1953. Di ruang pengembang pertama. Pada masa Orde Baru yang dimulai pada tanggal 6 Juni 1968, Jenderal TNI Suharto, Presiden Republik Indonesia merangkap sebagai Menteri Pertahanan.

Dari tanggal 28 Maret 1973 sampai dengan 29 Maret 1978, seorang pria bernama Jenderal TNI Maraden Pangabean mengambil alih jabatan Menteri Pertahanan di Kabinet Pembangunan Kedua. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1978 sampai dengan 19 Maret 1983, dalam Kabinet Pembangunan III Menteri Pertahanan yang juga Panglima TNI dilimpahkan kepada Jenderal TNI M. Yusuf, pada periode 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Indonesia UU No. 20.

TNI (purnawirawan) Jenderal Poniman menduduki jabatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada Kabinet berikutnya dari tanggal 19 Maret 1983 sampai dengan 23 Maret 1988. Juga, dari tahun 1988 hingga 1993, Jenderal TNI (pensiunan) LB Murdani menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, pada 1993-1998, Presiden Suharto mengangkat Jenderal TNI (purnawirawan) Edi Sudrajat sebagai Menteri Pertahanan.

Pada awal Reformasi, Presiden Indonesia Suharto mengundurkan diri dan Jenderal TNI Wiranto menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Presiden Republik Indonesia berganti dari Presiden Suharto menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Selanjutnya, sejak 22 Mei 1998 hingga 29 Oktober 1999, dalam Kabinet I Era Reformasi, Jenderal TNI Wiranto masih diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pada tanggal 1 Juli 2000, pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid yang disapa Gus Dur, Polri secara resmi memisahkan Kementerian Pertahanan Nasional dan Kementerian Keamanan Nasional, serta Presiden TNI. Pada tanggal 1 Juli 2000, ketika

Gus Dur menjabat, polisi Indonesia resmi dibebaskan dari Departemen Pertahanan Nasional, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipindahkan langsung ke badan otonom. kepada Presiden Republik. Indonesia. Pada era kabinet yang dipimpin oleh Gus Dur, posisi Menhan dijabat oleh kalangan akademisi sipil, yaitu Prof. Dr. Juwono Sudarsono untuk periode 1999-2000 dan Guru Besar dari 26 Agustus 2000 sampai 14 Agustus 2001. Mahfud M.D. Dari Sejak 14 Agustus 2001 hingga 25 Oktober 2004, posisi Menteri Pertahanan dialihkan kepada H. Matori Abdul Jalil yang dipimpin oleh Megawati Sukarno Putri.

Selama Jilid I Kementerian Republik Indonesia dari tanggal 29 Oktober 2004 sampai dengan 26 Oktober 2009 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, prof. Dr. Juwono Sudarsono diangkat kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sejumlah RUU "pertahanan" (RUU), antara lain RUU Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional, RUU Rahasia Negara, RUU Peradilan Militer, dan RUU Veteran, disusun dan diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

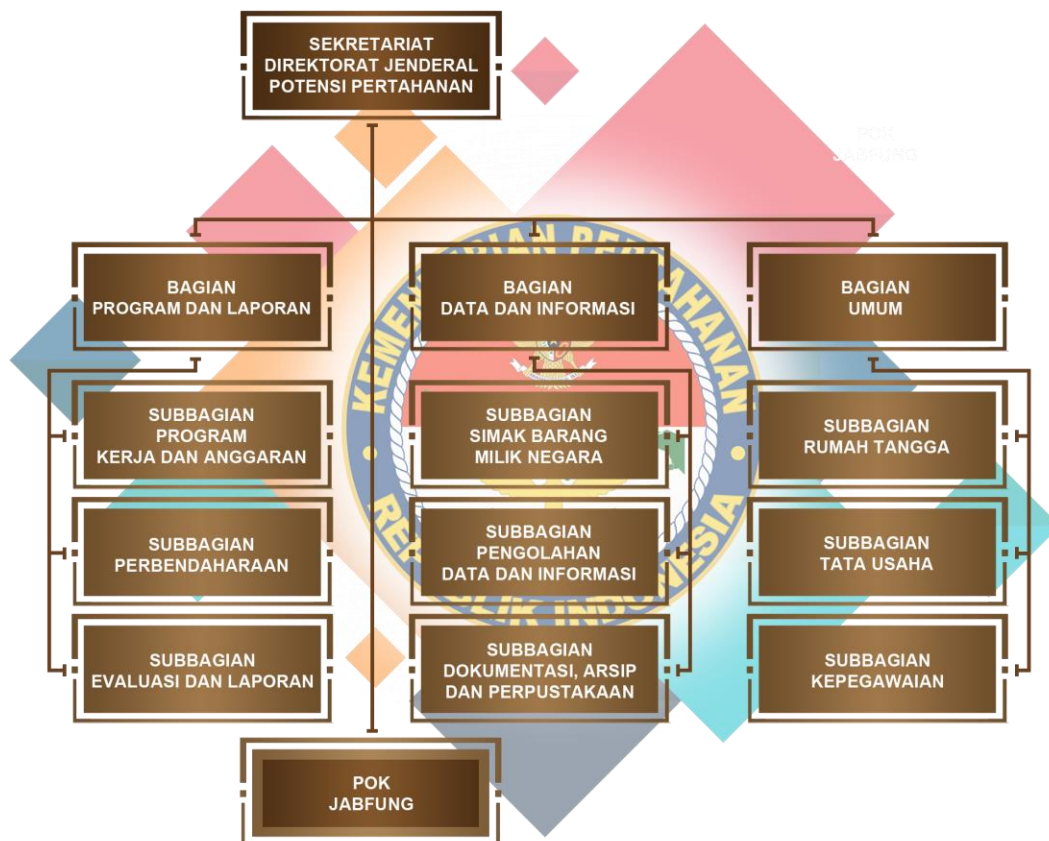
Selain itu, selama 2009-2014, kembali dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, posisi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Kedua Indonesia adalah Prof. Dr. Ir Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM di Kabinet Indonesia Bersatu dan Letnan Jenderal TNI Shafri Shamsuddin, M.BA menjabat sebagai Wakil Menteri. Pada tanggal 6 November 2008, nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia diubah menjadi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Kementerian Negara.

Tindakan dan tujuan politik Kementerian Pertahanan Negara sangat bervariasi tergantung pada keadaan dan kepala negara pada saat dia dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan selalu menempati posisi yang sangat strategis dan memegang peranan penting, baik sekarang maupun yang akan datang, mulai dari era Deklarasi, Orde Lama dan Orde Baru hingga era Reformasi. Keamanan nasional dan keamanan nasional, berperan

penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Kementerian Pertahanan RI, Ditjen Potan, di mana praktikan ditempatkan untuk melakukan Kerja Profesi pada Sub. Bagian Program Kerja Dan Anggaran. Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang di pimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Aribowo Teguh Santoso S.T., M.Sc., Bagian Program dan Laporan di pimpin langsung oleh Kepala Bagian Kolonel Armada (ARM). Dani Suripto dan kepala Sub Bagian dipimpin oleh Ibu Heni Astuti S.E.



2.3 Kegiatan Umum Instansi

Menurut Pasal dari buku Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertahanan, Sub Bagian Program dan Laporan. sebagai berikut :

- Pasal 538

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut BagProglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan administrasi keuangan.

- Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, bag Proglap Menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan anggaran Ditjen;
- Pengelolaan administrasi keuangan, pengujian atas permintaan pembayaran dan penyusunan laporan keuangan;
- Penyiapan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja dan anggaran Ditjen; dan
- Penyusunan rencana kinerja, pengukuran serta laporan kinerja Ditjen.

- Pasal 540

Bag Proglap terdiri atas:

- Subbagian Program Kerja dan Anggaran
- Subbagian Perbendaharaan; dan
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

- Pasal 541

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Projagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Projagar mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran.